

STRATEGI PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS* (AHP)

Oleh:

Afni Nooraini dan Afif Syarifudin Yahya

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: noorainiafni@gmail.com

ABSTRACT

Development is an important factor in the administration of government, especially in the regions. Good development must consider the balance between economic, social and environmental, which is referred to as sustainable development. Development in the Pulogadung Industrial Area has not fulfilled the element of sustainable development. There are strategies by SWOT analysis to realize sustainable development in the pulogadung industrial area are Intensifying supervision of industrial activities; Encourage and facilitate community-based environmental education; Providing training to employees; Socializing environmentally friendly waste management to the public; Holding regular coordination with other areas to minimize urbanization; Tightening enforcement against companies that violate the rules; Encourage stakeholders to care for the environment; and Doing the physical and inner guidance to the public.

The method used in this research is qualitative descriptive with quantitative data usage. The data used are primary data and secondary data. Informants and respondents involved in this study amounted to 81 people who are environmental experts, environmental law enforcement officers, Pulogadung Industrial Zone and society. The technique of collecting data through interviews, observation, documentation and questionnaires were analyzed using triangulation techniques and Analytical Hierarchy Process (AHP). The research instrument is the researcher himself.

The conclusion of this research are: The Priority Strategy of the Local Government of DKI Jakarta To Realize Sustainable Development Around the Pulogadung Industrial Area which was analyzed using Expert Choice 11 is Tightening law enforcement against companies that violate the rules with a weight of 0.226 and a consistency index value of 0.03 which means that the assessment of the experts is consistent. Recommendations for this research are: Law enforcement needs to be tightened again by adding law enforcement personnel/ staff and adding environmental complaints posts.

Keywords: priority strategy, sustainable development, pulogadung industrial estate

PENDAHULUAN

Sebuah negara akan berjalan tidak seimbang jika tidak ada dukungan

penuh dari masyarakat, swasta dan pemerintah. Pemerintah (baik di pusat maupun di daerah) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara menjadi

aktor utama dalam melayani segala kebutuhan masyarakat. Beberapa tugas pokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah menurut Ryaas Rasyid ada tiga fungsi, yakni pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.¹ Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan bersama-sama dengan baik dan berkesinambungan agar roda penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berputar.

Pembangunan merupakan salah satu tugas primer dalam pemerintahan, karena masih banyak yang harus dibenahi baik yang sifatnya fisik (jalan, irigasi, dan sebagainya) maupun non fisik (sumber daya manusia) khususnya bagi daerah-daerah di Indonesia.

Pembangunan pada zaman dahulu kurang memperdulikan keseimbangan lingkungan sehingga banyak lingkungan yang rusak akibat dari pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah saat ini mulai menyadari pentingnya kesehatan dari lingkungan sebagai salah satu unsur yang akan mendapatkan dampak dari pesatnya pembangunan-pembangunan yang ada di sekitarnya.

Pembangunan yang dalam pelaksanaannya mengutamakan adanya keselarasan dalam bidang ekonomi, sosial serta lingkungan dinamakan pembangunan berkelanjutan yang pertama

kali dicetuskan dalam Komisi Brundtland. Dalam *Brundtland Commission Report* yang berjudul *Our Common Future*, “*Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.² Sikap dan perilaku manusia saat ini akan berpengaruh terhadap kelangkaan alam yang terjadi di masa yang akan datang. Jika fenomena alam sifatnya positif, maka manusia yang hidup di masa lalu telah melindungi kelangkaan alam, akan tetapi jika fenomena alam bersifat negatif, maka kemungkinan besar *effort* manusia di zaman lampau dalam menyelamatkan alam masih sedikit, kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pemerintah telah membuat kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, Undang-Undang tersebut berasas pada Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya membahas poin-poin terkait pembangunan berkelanjutan, yaitu:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

1 Muhammad, Muhammad Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000, hlm 59

2 Surna T. Djajadiningrat, “*Population and Development for a Sustainable Future*”, paper presented in the Seminar “*World Without Borders: Policy Options for Growth and Sustainability in East Asia and the Pacific*, conducted by Society for International Development East Asia and the Pacific Regional Conference, Jakarta, Yogyakarta, Bali, July 18-22, 1990, hlm 3

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁴

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁵

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara mendukung Undang-Undang tersebut dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan salah satu asas yang diusungnya yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁶ Hanya saja implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya dijalankan dengan benar sehingga belum efektif, faktanya pencemaran lingkungan⁷ (udara, air dan tanah) dan berbagai kerusakan lingkungan⁸ lainnya masih terjadi.

3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (4)

4 Ibid, pasal 28H ayat (3)

5 Ibid, ayat (1)

6 Lihat dalam pasal 2 ayat (1) huruf j dan huruf k

7 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (15), "Pencemaran lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya".

8 Beberapa persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat, diantaranya mengenai banjir, kebakaran lahan/hutan, bencana asap, *global warming*, kerusakan lahan akibat pertambangan. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/review-laporan-kerusakan-lingkungan-dan-perubahan-iklim-tahun-2013-sebagai-bahan-penyusunan-rpjm-tahun-2015-2019/>, 1 Maret 2015, pukul 19.27

Kawasan industri menjadi salah satu sumber devisa bagi pemerintah pusat dan daerah serta memberikan *trickle down effect* kepada masyarakat.. Kawasan industri pertama, terbesar dan tertua di Indonesia didirikan pada tahun 1973 dikenal dengan Kawasan Industri Pulogadung atau *Jakarta Industrial Estate Pulogadung* (PT.JIEP/Persero).⁹ PT.JIEP ini disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada tanggal 26 Juni 1973. Saham dari perusahaan ini 50% dimiliki Kementerian BUMN dan 50% milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan industri ini memiliki sekitar 375 perusahaan.

Kawasan Industri Pulogadung terletak di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur. Kelurahan Jatinegara adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cakung yang hampir semua wilayahnya (11 RW dari 14 RW) berada di pinggiran Kawasan Industri Pulogadung (sekitar 398,15 Ha). Kelurahan Rawa Terate adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cakung yang memiliki 6 RW dan lebih dari setengah luas wilayahnya (sekitar 187 Ha) untuk sektor perindustrian.

Adanya kegiatan industri yang dikelola oleh PT.JIEP di lingkungan Kelurahan Jatinegara maupun di Kelurahan Rawa Terate ini telah menimbulkan beberapa permasalahan dan belum mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah

9 Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 b.3/2/35/69 pada 20 Mei 1969, maka batas-batas Kawasan Industri Pulogadung mencakup 425 hektar; melalui Keputusan Gubernur No. 424 pada 29 April 1981 dan revisi Keputusan No.519 pada 14 Maret 1988 dengan tambahan luas sebesar 183 hektar. Diakses dari <http://jiep.co.id/profil-kip/profil-kawasan/>, 24 Maret 2015, pukul 22.17

Provinsi DKI Jakarta¹⁰ dan visi PT.JIEP¹¹. Munculnya permasalahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah belum melakukan koordinasi dan pengawasan dengan baik kepada PT. JIEP sebagai pengelola.

Beberapa permasalahan yang terdapat di Kelurahan Jatinegara dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di pinggiran kawasan industri antara lain tingginya tingkat urbanisasi (Tahun 2011 berjumlah 1.023 jiwa, tahun 2012 berjumlah 1.319, tahun 2013 berjumlah 1.740 jiwa dan tahun 2014 berjumlah 2.008 jiwa)¹², tingginya kepadatan penduduk (Jumlah Penduduk tahun 2011 yaitu 99.592 jiwa, tahun 2012 yaitu 99.799

jiwa, tahun 2013 yaitu 100.362 jiwa, tahun 2014 yaitu 97.093 jiwa dan tahun 2015 yaitu 94.885 jiwa. Hal ini juga disebabkan angka kelahiran tinggi yaitu tahun 2011 berjumlah 711 jiwa, tahun 2012 berjumlah 790 jiwa, tahun 2013 berjumlah 1.603 jiwa dan tahun 2014 berjumlah 1.832 jiwa)¹³; masih terdapat kemiskinan (Dilihat dari data keluarga pra sejahtera tahun 2015 yang berjumlah 3.797 KK)¹⁴; terjadinya pencemaran air dan udara;¹⁵ tingginya kerawanan sosial (tawuran)¹⁶ dan kriminalitas (Daerah rawan kriminalitas terletak di RW 01 dan RW 11. Kriminalitas pada tahun 2014 berjumlah 18 kali dan tahun 2015, 23 kali terjadi yang terdiri dari tawuran, perampokan, kebakaran, unjuk rasa dan pembunuhan);¹⁷ terdapat permukiman kumuh (Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang, permukiman kumuh di Kelurahan Jatinegara terdapat di RW 05 dan RW 12)¹⁸; terdapat daerah rawan kebakaran¹⁹; dan permasalahan lainnya. Sedangkan

10 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah: "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik". Misinya sebagai berikut: (1) Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain; (3) Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta; (4) Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota; dan (5) Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Diakses dari http://beritajakarta.com/statistics/visimisi_gubernur, tanggal 9 Mei 2015, pukul 22.17

11 Visinya yakni "Menjadi Pengembang dan Pengelola yang Berstandar Internasional di Bidang Kawasan Terpadu Untuk Industri, Bisnis, Properti, Logistik, yang Mandiri dan Bernilai Tambah Tinggi Serta Berwawasan Lingkungan". Diakses dari <http://jiep.co.id/>, 10 April 2015, pukul 10.28

12 Statistik Penduduk Tingkat Kelurahan Jatinegara Tahun 2011-2014

13 Ibid

14 Ibid

15 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada tanggal 30 Maret 2015, pukul 11.25. Beliau mengatakan bahwa pencemaran air ini disebabkan oleh bahan-bahan buangan yang tidak disaring terlebih dahulu, seperti contohnya pemotongan ayam yang paling berperan dalam menimbulkan pencemaran air.

16 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang, beliau mengatakan bahwa kerawanan sosial yaitu tawuran pemuda-pemuda di sepanjang rel kereta api di RT 08. Tawuran ini meresahkan warga karena pelaku tawuran juga menjarah barang-barang warga bahkan pernah sampai mencuri uang warga senilai Rp 15.000.000,-.

17 Laporan tahunan Kelurahan Jatinegara Tahun 2014 dan 2015

18 Dapat dilihat di Tabel 1.6

19 Daerah yang rawan kebakaran yaitu terletak di Kawasan Industri Pulogadung (PT.JIEP). Lihat Tabel 1.7

permasalahan di Kelurahan Rawa Terate dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan khususnya dengan kondisi di pinggiran kawasan industri diantaranya masih adanya kawasan permukiman kumuh;²⁰ masih cukup tingginya angka kemiskinan;²¹ tingginya gelombang urbanisasi; masih terdapat beberapa titik daerah rawan banjir meskipun telah dibuat lubang biopori/resapan ± 761 biopori (Daerah rawan genangan air dan banjir yaitu di RT 015 dan RT 016 RW 04, RT 001 dan RT 010 RW 05)²²; Masih terdapat kawasan rawan kebakaran;²³ terdapat pencemaran air (Pada Bulan September 2012, daerah yang melebihi standar baku mutu Mangan (Mn) normal 0,5 mg/L yaitu di Kelurahan Rawa terate dengan nilai 1,19 mg/L), tanah (oleh limbah domestik) dan udara; dan permasalahan lainnya.

Jumlah warga miskin di Kelurahan Rawa Terate mengalami kenaikan dari tahun 2011-2012 berjumlah 329 jiwa, sedangkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan berjumlah 137 jiwa.²⁴

Kelurahan Rawa Terate memiliki rumah kumuh, daerah kawasan banjir dan daerah kawasan kebakaran yang lebih banyak (4 RW) dibandingkan dengan Kelurahan Jatinegara (1 RW). Jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Rawa Terate berjumlah 4.124 KK atau 11.883 jiwa, sedangkan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan

Jatinegara berjumlah 868 KK atau 3735 jiwa. Di Kelurahan Rawa Terate terdapat 11 RT rawan banjir, sedangkan di Kelurahan Jatinegara hanya 2 RT yang rawan banjir.²⁵ Di Kelurahan Rawa Terate terdapat 5 daerah rawan kebakaran, sedangkan di Kelurahan Jatinegara terdapat 2 RT rawan kebakaran.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Jakarta Timur sudah menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung yang peneliti jelaskan melalui analisis SWOT dari Freddy Rangkuti, meliputi:

1. Kekuatan (Strengths), terdiri dari: Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Ketersediaan Sumber Daya Finansial dan fisik yang memadai; dan Koordinasi yang baik antar SKPD di Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
2. Kelemahan (Weaknesses), terdiri dari Rendahnya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang ahli; Kurangnya penegakan terhadap kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan dan Belum terciptanya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
3. Peluang, terdiri dari Terbukanya lapangan pekerjaan; Pengawasan terhadap kegiatan industri lebih mudah; dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Tantangan, terdiri dari: Peningkatan Urbanisasi; Penurunan Kualitas lingkungan hidup; Kualitas kesehatan

20 Lihat Tabel 1.7

21 Lihat Tabel 1.6

22 Diakses dari <http://www.Rawaterate.net/?page=Gambaran.Umum>, 17 Maret 2015, pukul 06.56

23 Lihat Tabel 1.7

24 Laporan hasil kegiatan Oktober 2014 Pemerintah Kelurahan Rawa Terate Kecamatan Cakung

25 BPS DKI Jakarta Tahun 2013

masyarakat menurun; Perusahaan tidak taat aturan; dan Peningkatan kerawanan sosial dan kriminalitas

Beberapa strategi yang dihasilkan sebagai implikasi persilangan antara faktor internal dan faktor eksternal untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung yaitu:

1. Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan industri;
2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pendidikan berbasis lingkungan;
3. Memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai bidangnya masing-masing;
4. Mensosialisasikan pengelolaan sampah ramah lingkungan kepada masyarakat;
5. Mengadakan koordinasi secara rutin dengan daerah lain dalam rangka meminimalisir urbanisasi;
6. Memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan;
7. Mendorong *stakeholder* untuk peduli lingkungan;
8. Menegakkan seluruh kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan;
9. Melakukan pembinaan fisik dan batiniah kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan *research* tentang “Strategi Prioritas Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Industri Pulogadung dengan metode *Analytical Hierarchy Process*” pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, Apa strategi prioritas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung dengan metode *Analytical Hierarchy Process*?

LANDASAN TEORI

Konsep Strategi

Alfred Chandler menyebutkan strategi, “*the determination of long-term goals of an enterprise and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals*”.²⁶ Peneliti memaknai definisi di atas bahwa mengadopsi tindakan-tindakan yang menguntungkan perusahaan dan pengalokasian berbagai sumber daya menjadi salah satu penentu dan penunjang ketercapaian tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan. Sedangkan strategi oleh Kenneth Andrews diartikan sebagai “*the pattern of objectives, purposes or goals, and the major policies and plans for achieving these goals stated in such a way as to define what business the company is in or should be in and the kind of company it is or should be*”.²⁷ Seluruh perencanaan (tujuan, kebijakan) terhadap organisasi merupakan penggambaran bentuk perusahaan yang akan dijalankan saat ini atau di masa mendatang.

Ireland dkk menyatakan bahwa *a strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage*.²⁸ Strategi menjadi

²⁶ Ismail, Op.cit., hlm 25

²⁷ Ibid

²⁸ R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson & Michael A. Hitt, *The Management of Strategy-Concept and Cases*, South Western: Cengage Learning, 2008, p.4

satu perpaduan antara sinkronisasi seluruh kegiatan dan tanggung jawab seluruh pegawai dalam organisasi untuk menggali kelebihan-kelebihan yang dapat disaingkan dengan organisasi lain. Jadi kegiatan satu dengan yang lain seyogianya ada keharmonisan dan perlu tercipta juga *sense of belonging* semua pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Pada dasarnya yang dimaksud strategi bagi organisasi swasta maupun organisasi publik adalah rencana dengan skala besar yang berorientasi jangkauan jauh ke depan dan ditetapkan sematang mungkin oleh internal organisasi agar mereka dapat berinteraksi secara efektif dan intensif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai target organisasi yang berkaitan.

Konsep Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process atau proses hirarki analitik ini diciptakan oleh Thomas L. Saaty, seorang pakar matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Pada umumnya AHP dirancang untuk menyaring secara rasional tanggapan orang yang terkait erat dengan suatu permasalahan melalui prosedur yang dibentuk untuk sampai pada skala 25 preferensi diantara beragam alternatif. AHP menjadi suatu pendekatan analisis yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan-permasalahan yang pelik.

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a basic approach to decision making. It is designed to cope with both

*the rational and the intuitive to select the best from a number of alternatives evaluated with respect to several criteria. In this process, the decision maker carries out simple pairwise comparison judgments which are then used to develop overall priorities for ranking the alternatives. The AHP both allows for inconsistency in the judgments and provides a means to improve consistency.*²⁹

*The analytical Hierarchy Process is a general theory of measurement. It is used to derive ratio scales from both discrete and continuous paired comparisons in multilevel hierarchic structures. The AHP has a special concern with departure from consistency and the measurement of this departure, and with dependence within and between the groups of elements of its structure. It has found its widest applications in multicriteria decision making, in planning and resource allocation, and in conflict resolution.*³⁰

AHP dapat dikatakan pengukuran karena di dalamnya terdapat kegiatan membandingkan antar pilihan strategi-strategi yang telah ada berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan bersama dalam suatu organisasi kemudian pilihan-pilihan tersebut dilakukan penjumlahan dan menghasilkan urutan strategi dari nilai tertinggi sampai terendah. Dengan kegiatan ini, akan didapat strategi yang sangat tepat untuk dapat diterapkan pada organisasi. Dengan kata lain, AHP

29 Thomas L. Saaty & Luis G. Vargas, *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process, Second Edition*, New York: Springer, 2012, hlm 1

30 Ibid, hlm 3

sebenarnya mempermudah organisasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan tertentu ataupun dalam penyelesaian suatu masalah. Dengan AHP, proses keputusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan mudah.³¹

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.³²

*The seven pillars of the AHP are: (1) Ratio scales, proportionality, and normalized ratio scales; (2) Reciprocal paired comparisons; (3) Sensitivity of the principal right eigenvector; (4) Homogeneity and clustering; (5) Synthesis that can be extended to dependence and feedback; (6) Rank preservation and reversal; and (7) Group judgments.*³³

There are four axioms in the AHP. Briefly and informally they are concerned with the reciprocal relation, comparison of homogeneous elements, hierarchic and systems dependence and with expectations about the

*validity of the rank and value of the outcome and their dependence on the structure and its extension.*³⁴

Tabel 1
The Fundamental Scale

<i>Intensity of Importance</i>	<i>Definition</i>	<i>Explanation</i>
1	<i>Equal importance</i>	<i>Two activities contribute equally to the objective</i>
2	<i>Weak</i>	
3	<i>Moderate importance</i>	<i>Experience and judgment slightly favor one activity over another</i>
4	<i>Moderate plus</i>	
5	<i>Strong importance</i>	<i>Experience and judgment strongly favor one activity over another</i>
6	<i>Strong plus</i>	
7	<i>Very strong or demonstrated importance</i>	<i>An activity is favored very strongly over another; its dominance demonstrated in practice</i>
8	<i>Very, very strong</i>	
9	<i>Extreme importance</i>	<i>The evidence favoring one activity over another is of the highest possible order of affirmation</i>
<i>Reciprocals</i>	<i>If activity i has one of the above</i>	

31 Marimin, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 77

32 Ibid, hlm 76

33 Thomas, *Op.cit.*, hlm 24-25

34 Ibid, hlm 4

<i>of above</i>	<i>nonzero numbers assigned to it when compared with activity j, then j has the reciprocal value when compared with i</i>	
<i>Rationals</i>	<i>Ratios arising from the scale</i>	<i>If consistency were to be forced by obtaining n numerical values to span the matrix</i>

Sumber: Saaty³⁵

Dari skala banding di atas, angka 2, 4, 6 dan 8 memberikan gambaran bahwa nilai tersebut berada di antara nilai yang diapitnya. Hal ini memberikan kemudahan kepada responden dalam melakukan suatu penilaian terhadap kuesioner AHP.

Peneliti menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk membuat perbandingan terhadap strategi-strategi yang telah dihasilkan dari analisis SWOT, kemudian dilakukan pengukuran sampai akhirnya muncul strategi mana yang paling diprioritaskan/yang terbaik sampai pada strategi yang kurang diutamakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk dilaksanakan agar pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung dapat berjalan secara efektif.

Konsep Pembangunan

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahantingkatkesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu

35 Ibid, hlm 6

dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu.³⁶

*Development is any and all kinds of activities or processes that increase the capacity of people or the environment to meet human needs or improve the quality of human life. The product of development is people who are healthy, well-nourished, clothed, and housed; engaged in productive work for which they are well-trained; and able to enjoy the leisure and recreation we all need. Development is a complex of activities, some with social, some with economic objectives, some based on material resources, some on intellectual resources, all enabling people to reach their full potential and enjoy a good life.*³⁷

Pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Demikianlah, disini tercakup pengertian “menjadi” (*being*) dan “mengerjakan” (*doing*).³⁸ Memang diperlukan adanya satu gerakan besar dari pemerintah agar dapat mengurangi terjadinya perampasan, ketidakadilan, kesengsaraan, dan berbagai istilah lainnya yang menunjukkan keterbelakangan atau ketertinggalan di dalam masyarakat. Hal ini memerlukan kerja sama yang kuat antar *stakeholders* agar gerakan tadi dapat tepat sasaran,

36 Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hlm 10

37 IUCN-The World Conservation Union, edited by Thaddeus C.Trzyna, *A Sustainable World, Defining and Measuring Sustainable Development*, North America: International Center for the Environment and Public Policy, 1939, p.28

38 Rusyanto, Op.cit, hlm 21

sehingga aktivitas-aktivitas yang memarginalkan kelompok-kelompok tertentu dapat dikurangi.

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut.³⁹ Multidimensi disini diinterpretasikan sebagai keseluruhan aspek yang terkait dengan pembangunan yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Lewat pembangunan, prospeknya yaitu terjadi peningkatan ke arah yang lebih baik terhadap aspek-aspek yang disebutkan tadi.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai, “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).⁴⁰ Menurut peneliti, pembangunan dapat dikatakan sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (swasta/ lembaga-lembaga tertentu) untuk memberikan perubahan pada masyarakat.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali mengadakan sebuah pertemuan yang membahas tentang masalah-masalah

lingkungan yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm.⁴¹ Di konferensi itulah untuk pertama kalinya secara luas perwakilan warga dunia menekankan perlunya memperhitungkan aspek lingkungan pada program-program pembangunan yang selama ini dijalankan.⁴² Disini negara-negara maju dan berkembang mulai menyadari bahwa alam membutuhkan perhatian yang sama atau bahkan melebihi aspek lain. Dengan adanya isu lingkungan ini, negara tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam setiap tindakan yang dilakukan pemerintah. Sebagian delegasi negara berkembang bahkan curiga bahwa isu lingkungan adalah akal-akalan negara maju untuk menghindari dari tuntutan agar negara maju membantu negara berkembang dengan menyumbang sebesar 0,7% dari GDP mereka untuk negara berkembang.⁴³

Dua puluh tahun selepas konferensi Stockholm, PBB menyelenggarakan konferensi tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*) di Rio de Janeiro, Brasil, pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992, disebut dengan KTT Rio (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio)/*The Earth Summit*.

39 Michael Todaro, *Economic Development in The Third World*, London: Longmans, 1977, hlm 62

40 Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hlm 4

41 Konferensi ini diselenggarakan oleh PBB tanggal 5-16 Juni 1972, bertujuan untuk merundingkan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup. Konferensi ini umumnya disingkat menjadi UNCHE 1972 (*United Nations Conference on Human Environment, 1972*). Konferensi ini dihadiri oleh 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi antar pemerintah dan 258 LSM (NGOs) dari berbagai negara.

42 Iwan J. Azis, Lydia M. Napitupulu, dkk., *Pembangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: KPG, 2010, hlm 1

43 Emil Salim, “Preface: Looking Back to Move Forward”, Dalam Budi P. Resosudarmo (ed.), *The Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources*, Singapura: ISEAS, 2005, hlm xxi-xxv

KTT Rio merupakan suatu respon yang ditunjukkan negara di seluruh dunia bagi perkembangan masalah lingkungan yang semakin kronis setelah adanya Konferensi Stockholm.

Sejarah berdirinya pembangunan berkelanjutan diawali dengan terbentuknya Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*, WCED) yang lebih dikenal dengan Komisi Brundtland.⁴⁴ *At that time, the UN General Assembly realized that there was a heavy deterioration of the human environment and natural resources. To rally countries to work and pursue sustainable development together, the UN decided to establish the Brundtland Commission.*⁴⁵ Kemudian Komisi ini menggulirkan konsep pembangunan berkelanjutan, “*sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”.⁴⁶ Ada dua kunci konsep utama dari definisi tersebut. Pertama, konsep tentang kebutuhan atau *needs* yang

sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Kedua, konsep tentang keterbatasan atau *limitation* dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.⁴⁷

Dr. Emil Salim (1990) dalam makalahnya berjudul “*Sustainable Development: An Indonesian Perspective*” menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka panjang (*a longer term perspective*). Konsep tersebut menuntut adanya solidaritas antar generasi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengeliminasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.⁴⁸

Konsep Kawasan Industri

Kawasan industri (*Industrial Zone*) adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur; kawasan ini dilengkapi dengan prasarana, sarana/fasilitas penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri. Pemberian izin lokasi suatu kawasan industri oleh pemda setempat.⁴⁹

Merencanakan pembangunan kawasan Industri memang perlu memperhatikan hal-hal tertentu, salah satunya yakni ketepatan dalam menentukan tempat. Tempat yang diperuntukkan bagi kawasan industri seyogianya didirikan di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota, tetapi cukup jauh dari permukiman warga. Pada

44 Komisi ini dilaksanakan pada tahun 1987, yang diketuai oleh Ny. Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia, kemudian selanjutnya komisi ini dikenal dengan Komisi Brundtland. Komisi ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi saran bagi proses pembangunan berkelanjutan. Komisi ini resmi dibubarkan pada bulan Desember 1987 setelah laporannya terhimpun dalam buku *Our Common Future*. Komisi ini terdiri dari 9 orang mewakili negara maju dan 14 orang mewakili negara berkembang. Salah seorang anggotanya adalah Emil Salim sebagai perwakilan dari Indonesia, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

45 Diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission, 6 Februari 2015, pukul 10.18

46 Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan-Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm 2

47 Gro Harlem Brundtland, *Our Common Future*. The World Commission on Environment and Development, Oxford, New York: Oxford University Press, 1987, hlm 43

48 Sudharto, Op.cit., hlm 2

49 Ibid, hlm 59

tataran lokal, antara kawasan pemukiman dengan kawasan industri juga merupakan dua zona yang tidak kompatibel, sehingga umumnya diperlukan pemisahan zona penggunaan lahan yang tidak kompatibel tersebut.⁵⁰ Kedua zona tersebut menurut peneliti kurang tepat jika berada dalam lingkup yang berdekatan, karena para pemegang industri sebagian besar kurang memperhitungkan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tersebut serta pasti ada kegiatan-kegiatan yang sedikitnya memberikan ketidaknyaman (misalnya suara mesin yang mengganggu/berisik atau asap dari pengolahan produk yang menimbulkan bau tak sedap dan membuat sesak). Perlu adanya kesepakatan/kebijakan yang mengatur terkait jarak minimal dari area industri dengan perumahan atau permukiman warga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif (karena ingin *in-depth interview*) dengan penggunaan data kuantitatif, yang diukur melalui statistik deskriptif dan kemudian dinarasikan. Penelitian ini menggunakan teknik AHP dari Thomas L. Saaty.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan *snowball sampling* dengan 13 orang informan dan 3 orang responden dalam kuesioner *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu Kepala

Seksi Industri Manufaktur dan Agro pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Kasubbid. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *semistructure interview*, *structured observation*, dokumentasi dan angket tertutup. Kredibilitas data diuji peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan kuesioner.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung telah dirumuskan menggunakan analisis SWOT dari Freddy Rangkuti dan telah menghasilkan 9 strategi yang telah penulis uraikan dalam bab pendahuluan. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusianya maupun anggaran/dana, maka dibutuhkan strategi yang lebih utama untuk dilaksanakan demi terwujudnya tujuan yang diinginkan tadi. Dari hasil analisis SWOT sebetulnya dapat diketahui strategi mana yang nantinya perlu untuk diprioritaskan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Akan tetapi, peneliti disini juga meminta penilaian para *expert* dalam menentukan skala prioritas kepentingan/urgensi penanganan dengan menggunakan analisis *Analytical Hierarchy Process*.

50 Sumbangan Baja, *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah: Pendekatan Spasial & Aplikasinya*, Yogyakarta: ANDI, 2012, hlm 82

Struktur elemen *Analytical Hierarchy Process* (AHP) ini berisi tujuan (pada tingkat 1), kriteria (pada tingkat 2) dan kriteria (pada tingkat 3). Peneliti menggunakan kriteria atau pencapaian pembangunan berkelanjutan menurut Murdiyarso, yakni harus menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), harus meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan memperhatikan kelestarian lingkungan (*environmental integrity*).⁵¹

Untuk menghitung strategi prioritas ini, peneliti membuat kuesioner dengan 111 pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan untuk menentukan kriteria yang dominan, 36 pertanyaan untuk menentukan alternatif strategi yang dikaitkan dengan 3 kriteria di atasnya yang peneliti pakai dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut membandingkan antara kriteria yang satu dengan kriteria lain untuk mendapatkan kriteria prioritas dan alternatif strategi yang satu dengan alternatif strategi lain yang berfokus pada kriteria tadi.

Expert yang digunakan peneliti disini berjumlah 3 orang yaitu Kepala Seksi Industri Manufaktur dan Agro, Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, karena mereka cukup mewakili dan ahli di bidangnya serta berkenan untuk membantu peneliti. Dalam menetapkan dan menghitung prioritas strategi ini, peneliti menggunakan aplikasi *Expert Choice II*.

Peneliti gambarkan dalam bentuk tabel IFAS dan EFAS perhitungan antar faktor internal dan eksternal di bawah ini:

51 Daniel Murdiyarso, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003, hal 140

Tabel 2
Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

No	Unsur	Bobot	Rating	Bobot X Rating	Komentar
1	Kekuatan (Strength) Komitmen Pemerintah Daerah	0,21	3,1	0,65	Pertahankan dan tingkatkan
2	DKI Jakarta dalam	0,19	2,9	0,55	
3	mewujudkan pembangunan berkelanjutan	0,19	3,2	0,61	
	Ketersediaan anggaran yang memadai Koordinasi yang baik antar SKPD di Pemerintah Daerah DKI Jakarta				Optimalkan sesuai prioritas Hubungan baik
1	Kelemahan (Weaknesses)	0,15	2,0	0,30	Perlu <i>training</i>
2	Rendahnya kuantitas	0,14	2,0	0,28	
3	Sumber Daya Manusia yang ahli Kurangnya penegakan kebijakan terkait Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan limbah belum ramah lingkungan	0,12	1,9	0,23	
Total		1,00		2,62	

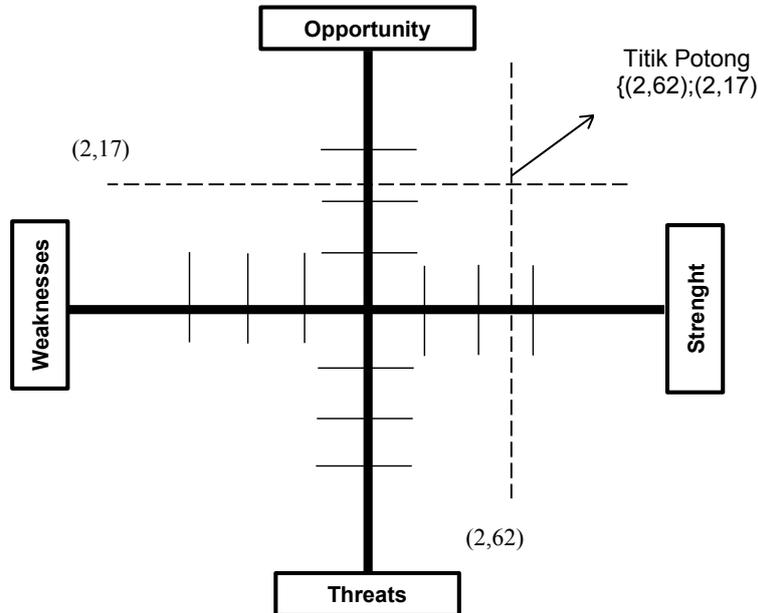
Sumber: Hasil analisis data Tahun 2011-2015

Tabel 3
Eksternal Factors Analysis Summary (EFAS)

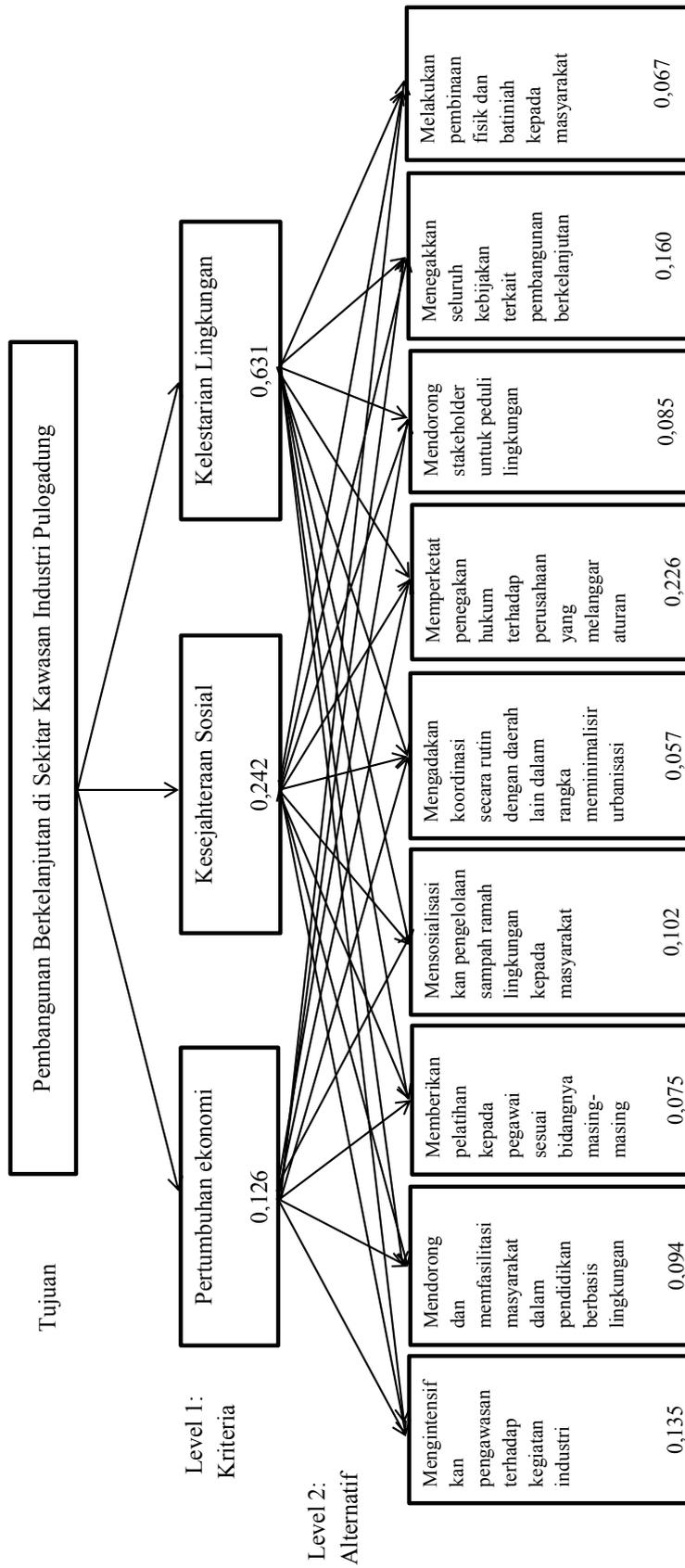
No	Unsur	Bobot	Rating	Bobot X Rating	Komentar
Peluang (Opportunity)					
1	Terbukanya lapangan pekerjaan	0,11	3,2	0,35	Manfaatkan
2	Pengawasan terhadap kegiatan industri lebih mudah	0,11	3,1	0,34	Intensifkan
3	Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,14	3,1	0,43	Kuasai dan terapkan
Ancaman (Threats)					
1	Peningkatan urbanisasi	0,12	2,1	0,25	Waspadai
2	Kualitas lingkungan hidup menurun	0,10	1,9	0,19	Benahi bersama
3	Kualitas kesehatan masyarakat menurun	0,11	1,9	0,21	Minimalisir
4	Perusahaan tidak taat aturan	0,10	2,0	0,20	
5	Kerawanan sosial dan kriminalitas tinggi	0,11	1,8	0,20	Perketat Perhatian
Total		1,00		2,17	

Sumber: Hasil analisis data Tahun 2011-2015

Dari perhitungan di atas, akan didapat perpotongan hasil IFAS dan EFAS sebagai berikut:



Gambar 1
Diagram Analisis SWOT



Gambar 2

Hierarki AHP Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung

Pada dasarnya, dari perpotongan skor IFAS dan EFAS ini dapat diketahui posisi Pemerintah Provinsi DKI bersama Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung berada dimana, yaitu berada di kuadran 1 yang mendukung strategi agresif (yakni menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan seluruh peluang yang dimiliki/strategi SO).

Akan tetapi, ada perbedaan hasil dalam menentukan strategi prioritas dari analisis peneliti dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP. Jika perhitungan dari SWOT menghasilkan strategi prioritas SO (strategi yang menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang dimiliki oleh pemerintah daerah), sedangkan dari perhitungan analisis AHP dihasilkan strategi ST (strategi yang menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mencegah berbagai ancaman yang dapat menghambat). Menurut peneliti hal ini wajar terjadi, yaitu dihasilkan *output* yang berbeda karena alat analisis yang digunakan pun berbeda. Dan peneliti disini lebih memilih untuk menggunakan hasil dari analisis AHP karena lebih akurat dan kredible sebab penilaian yang dilakukan langsung dari para ahli. Peneliti gambarkan hierarki AHP yang telah terbentuk dalam penelitian ini, sebagaimana tampak pada gambar 2 di muka.

Berdasarkan gambar 2, bobot hasil pengolahan *Expert Choice 11* dapat dikelompokkan menurut kriteria dan strategi alternatif yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pengolahan Kriteria AHP dengan
Expert Choice 11
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung

Level	Definisi	Bobot
I	Kriteria	
	Pertumbuhan Ekonomi	0,126
	Kesejahteraan Sosial	0,242
	Kelestarian Lingkungan	0,631

Sumber: Hasil olahan peneliti terhadap Analisis Kriteria Pembangunan Berkelanjutan dengan kuesioner AHP yang di *combined*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan tingkat kepentingan/prioritas terhadap kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria prioritas pertama adalah kelestarian lingkungan dengan bobot sebesar 0,631. Hal ini menunjukkan bahwa rekapitulasi pendapat *expert* menganggap bahwa kriteria yang terpenting dalam pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung adalah kelestarian lingkungan.
2. Kriteria prioritas kedua adalah kesejahteraan sosial dengan bobot sebesar 0,242. Artinya, bahwa *expert* menempatkan kriteria kesejahteraan sosial di posisi kedua setelah kelestarian lingkungan.
3. Kriteria prioritas ketiga atau terakhir adalah pertumbuhan ekonomi dengan bobot sebesar 0,126. Pertumbuhan ekonomi dinilai oleh *expert* sebagai kriteria paling akhir dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan setelah kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Bobot hasil pengolahan alternatif strategi dengan *Expert Choice 11* setelah

di *combine* dari para *expert* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Pengolahan Alternatif Strategi AHP dengan Expert Choice 11 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung

Level	Definisi	Bobot
II	<i>Strategi</i>	
	1. Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan industri	0,135
	2. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pendidikan berbasis lingkungan	0,094
	3. Memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai bidangnya masing-masing	0,075
	4. Mensosialisasikan pengelolaan sampah ramah lingkungan kepada masyarakat	0,102
	5. Mengadakan koordinasi secara rutin dengan daerah lain dalam rangka meminimalisir urbanisasi	0,057
	6. Memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan	0,226
	7. Mendorong stakeholder untuk peduli lingkungan	0,085
	8. Menegakkan seluruh kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan	0,160
	9. Melakukan pembinaan fisik dan batiniah kepada masyarakat	0,067

Sumber: Hasil olahan peneliti terhadap analisis alternatif strategi Pembangunan Berkelanjutan dengan kuesioner AHP yang di *combined*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan tingkat kepentingan/prioritas terhadap kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Strategi prioritas pertama, yaitu memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan dengan bobot 0,226. Penegakan hukum diperlukan sebagai upaya untuk menertibkan para pelaku usaha agar mentaati berbagai peraturan yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka meminimalisir pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi dan berakibat pada warga masyarakat sekitar.
2. Strategi prioritas kedua, yaitu menegakkan seluruh kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan dengan bobot 0,160. Kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan yang telah ada wajib untuk ditaati agar pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta tidak merugikan lingkungan.
3. Strategi prioritas ketiga, yaitu Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan industri dengan bobot 0,135. Pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung perlu dilakukan lebih sering karena kawasan ini memiliki perusahaan yang cukup banyak dan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya cukup banyak perusahaan yang melanggar aturan.
4. Strategi prioritas keempat, yaitu mensosialisasikan pengelolaan sampah ramah lingkungan kepada masyarakat dengan bobot 0,102. Pengelolaan sampah ramah

- lingkungan sebaiknya disosialisasikan dan digalakkan kepada warga agar dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengelola sampah di DKI Jakarta serta lingkungan lebih terjaga.
5. Strategi prioritas kelima, yaitu mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam pendidikan berbasis lingkungan dengan bobot sebesar 0,094. Pendidikan berbasis lingkungan selayaknya diberikan kepada masyarakat sejak usia dini agar masyarakat memiliki budaya hidup bersih dan sehat.
 6. Strategi prioritas keenam, yaitu mendorong stakeholder untuk peduli lingkungan dengan bobot 0,085. Dalam menjaga lingkungan diperlukan kerjasama antar *stakeholder* yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Jika hanya salah satu saja yang peduli, maka hasil yang didapat tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, jika ingin lingkungan tetap terjaga perlu kiranya kontribusi dari masing-masing *stakeholder* tadi.
 7. Strategi prioritas ketujuh, yaitu memberikan pelatihan kepada pegawai sesuai bidangnya masing-masing dengan bobot sebesar 0,075. Pegawai yang ahli di bidangnya sangat dibutuhkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan kegiatan pengawasan.
 8. Strategi prioritas kedelapan, yaitu melakukan pembinaan fisik dan batiniah kepada masyarakat dengan bobot sebesar 0,067. Pembinaan fisik (olahraga) dan batiniah (kegiatan keagamaan) kepada masyarakat perlu dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas, sehingga anak-anak muda lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif.
 9. Strategi prioritas kesembilan, yaitu Mengadakan koordinasi secara rutin dengan daerah lain dalam rangka meminimalisir urbanisasi dengan bobot sebesar 0,057. Koordinasi dengan daerah lain disini khususnya dengan daerah pinggiran Jakarta agar membicarakan langkah-langkah tepat yang harus diambil agar mengurangi para urban datang ke Jakarta.
- Strategi prioritas yang telah dilakukan penilaian oleh para *expert* diatas memiliki nilai indeks konsistensi 0,03. Artinya jika nilai indeks konsistensi kurang dari 0,1 ($< 0,1$) maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian dari para *expert* yang dipilih konsisten, memuaskan dan dapat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian *expert* yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menentukan strategi prioritas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pulogadung dengan metode *Analytical Hierarchy Process* adalah konsisten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Strategi Prioritas Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Sekitar Kawasan Industri Pulogadung dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dianalisis menggunakan *Expert Choice II* yaitu Memperketat penegakkan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan dengan bobot 0,226 dan nilai indeks konsistensinya 0,03

yang berarti bahwa penilaian para *expert* adalah konsisten.

Rekomendasi yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah penegakkan hukum perlu diperketat kembali dengan cara melakukan penambahan personel/pegawai penegak hukum dan penambahan posko pengaduan lingkungan hidup.

Penambahan personel/pegawai penegak hukum ini sangat dibutuhkan agar tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan PPLHD dapat segera ditangani dan tidak membutuhkan waktu lama. Kemudian posko pengaduan lingkungan hidup perlu ditambah juga karena baru ada di BPLHD Provinsi saja, sedangkan di Kabupaten dan Kota Administratif di DKI Jakarta belum ada. Penambahan ini dilakukan agar memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan sekaligus membantu pemerintah dalam mengawasi kegiatan-kegiatan industri yang beroperasi di Kawasan Industri Pulogadung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Raharjo, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azis, Iwan J., Lydia M.Napitupulu, dkk., 2010, *Pembangunan Berkelanjutan-Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: KPG.
- Baja, Sumbangan, 2012, *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah: Pendekatan Spasial & Aplikasinya*, Yogyakarta: ANDI.
- Bruntland, Gro Harlem, 1987, *Our Common Future*. The World Commission on Environment and Development, Oxford, New York: Oxford University Press.
- Hadi, Sudharto P, 2012,

Dimensi Lingkungan-Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- IUCN-The World Conservation Union, 1995, *A Sustainable World, Defining and Measuring Sustainable Development*, North America: International Center for the Environment and Public Policy.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Resosudarmo, Budi P (ed.), 2005, *The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources*, Singapura: ISEAS.
- Siagian, Sondang P., 2008, *Manajemen Strategik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail, 2012, *Manajemen Strategik*, Bandung: Erlangga.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2007, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Todaro, Michael, 1977, *Economic Development in The Third World*, London: Longmans.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website

- www.menlh.go.id
- <http://jiep.co.id/profil-kip/profil-kawasan/>
- <http://www.Rawaterate.net/>

Lain-Lain

- Djajadiningrat, Surna T., 1990, "Population and Development for a Sustainable Future", paper presented in the

*Seminar “World Without Borders:
Policy Options for Growth and
Sustainability in East Asia and the
Pacific, conducted by Society for*

*International Development East Asia
and the Pacific Regional Conference,
Jakarta, Yogyakarta, Bali, July 18-22.*